

**PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM UPAYA MENGURANGI  
MASALAH PENGANGGURAN TERDIDIK  
DI WILAYAH KOTA SURAKARTA**

*THE ROLE OF THE MANPOWER DEPARTEMENT IN EFFORTS TO REDUCE  
THE PROBLEM OF EDUCATED  
UNEMPLOYMENT IN THE SURAKARTA CITY AREA*

**Sela Nurrussyita\* , Riska Wirawan\*\***

Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
[selanrsyta@gmail.com](mailto:selanrsyta@gmail.com), [riskawirawan91@gmail.com](mailto:riskawirawan91@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pengangguran terdidik merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh banyak kota, termasuk Kota Surakarta. Ironinya pengangguran yang ada di Surakarta sebagian besar adalah mereka yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi, yakni SLTA dan Diploma maupun tingkat Sarjana. Salah satu penyebab masih banyak pengangguran terdidik yaitu ketidaksesuaian antara keterampilan dan kebutuhan pasar kerja dan faktor individu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Disnaker dalam upaya mengurangi masalah pengangguran terdidik di wilayah Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan teori menurut Gede Diva (2019:15-18) bahwa peran pemerintah daerah sebagai Regulator, Fasilitator dan Katalisator. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disnaker Kota Surakarta memiliki peran penting dalam mengurangi pengangguran terdidik melalui program dan kegiatan, program-program tersebut antara lain pelatihan kerja dengan menyelenggarakan pelatihan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Bursa kerja yaitu dengan memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan melalui bursa kerja. Dinas Tenaga Kerja menyediakan informasi pasar kerja yang akurat dan terkini kepada pencari kerja terdidik. Kerjasama dengan perusahaan dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk memberikan kesempatan kerja kepada pencari kerja terdidik.

**Kata Kunci:** Dinas Tenaga Kerja, Peran, Pengangguran Terdidik

## ABSTRACT

*Educated unemployment is a complex problem faced by many cities, including Surakarta. Ironically, most of the unemployed in Surakarta are those who have a fairly high level of education, namely high school and diploma or bachelor's level. One of the causes of the large number of educated unemployed is the mismatch between skills and labor market needs and individual factors themselves. This study aims to determine the role of the Manpower Office in efforts to reduce the problem of educated unemployment in the Surakarta City area. This study uses the theory according to Gede Diva (2019:15-18) that the role of local government as a Regulator, Facilitator and Catalyst. This study uses a descriptive qualitative method. Data collection used is interviews, documentation, and observation. The analysis techniques used are data collection, data condensation, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that the Surakarta City Manpower Office has an important role in reducing educated unemployment through programs and activities, these programs include job training by organizing job training aimed at improving the skills and competencies of job seekers to match the needs of the labor market. Job fairs, namely by facilitating meetings between job seekers and companies through job fairs. The Manpower Office provides accurate and up-to-date job market information to educated job seekers. Cooperation with companies by establishing cooperation with companies to provide job opportunities for educated job seekers.*

**Keywords:** *Department of Manpower, Role, Educated Unemployment*

## PENDAHULUAN

Tantangan besar dalam bidang ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini adalah tingkat pengangguran yang masih besar jumlahnya, lapangan pekerjaan belum mencukupi, dan peningkatan pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Pengangguran di negara sedang berkembang pada umumnya di dominasi oleh pengangguran usia muda dan berpendidikan (Todaro & Smith, 2006). Pengangguran adalah salah satu isu sosial yang signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia.

Meskipun tingkat pendidikan masyarakat meningkat, fenomena pengangguran terdidik masih menjadi tantangan yang serius. Pengangguran terdidik merujuk pada individu yang telah menyelesaikan pendidikan formal, namun belum mampu memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pendidikan yang diterima dan kebutuhan pasar kerja. Salah satu faktor penyebab pengangguran terdidik adalah kurangnya keterampilan yang relevan dengan

kebutuhan industri. Banyak lulusan yang memiliki pendidikan tinggi tetapi tidak memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, kurikulum pendidikan yang tidak selalu selaras dengan perkembangan industri juga menjadi penyebab utama. Ketidakcocokan ini menciptakan kesenjangan antara lulusan dan kebutuhan pasar. Di Kota Surakarta jumlah pengangguran masih tinggi meskipun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Semakin disayangkan pengangguran yang tersebar di Kota Surakarta sebagian besar adalah pengangguran yang memiliki pendidikan cukup tinggi, yakni SLTA dan diploma maupun tingkat sarjana. Tahun 2024 jumlah pengangguran ada di angka 4,58 persen atau sekitar 13 ribu orang. Jumlah ini turun jika dibandingkan dengan tahun lalu, namun masih menjadi tantangan besar untuk mengentaskan pengangguran. Di Surakarta sendiri tingkat pengangguran terdidik menjadi suatu masalah yang harus diperhatikan mengingat kota ini banyak institusi pendidikan yang menghasilkan lulusan setiap tahunnya namun tidak semua terserap dalam dunia kerja, itu semua disebabkan karena kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin banyak persaingan kerja. Persaingan yang ketat, banyak lulusan memiliki latar belakang

pendidikan yang serupa, sehingga sulit bagi perusahaan untuk membedakan kandidat yang satu dengan yang lainnya. Hal ini menyebabkan persaingan yang ketat di posisi pekerjaan yang sama, banyak perusahaan lebih memilih kandidat yang memiliki pengalaman kerja membuat lulusan baru kesulitan untuk mendapatkan posisi yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Keterbatasan akses pada informasi dan pelatihan kerja, banyak lulusan perguruan tinggi tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai lowongan pekerjaan yang relevan dengan bidang studi mereka. Keterbatasan ini sering disebabkan oleh kurangnya platform yang menghubungkan antara pencari kerja dan perusahaan. Program pelatihan kerja yang tersedia sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini mengakibatkan lulusan tidak memiliki keterampilan yang relevan, banyak pelatihan yang tidak terakreditasi sehingga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan kerja lulusan. Dalam banyak kasus, akses ke pelatihan sering kali terbatas oleh faktor geografis. Daerah pedesaan atau terpencil mungkin tidak memiliki akses ke pusat pelatihan yang berkualitas infrastruktur yang buruk juga dapat membatasi mobilitas lulusan untuk mencari pelatihan yang lebih baik di kota-kota besar. Banyak lulusan tidak mempunyai

keterampilan spesifik yang dibutuhkan industri, ini dapat disebabkan oleh kurangnya bimbingan karor di institusi pendidikan. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program pelatihan kerja setelah lulus, dengan alasan utama adalah kurangnya informasi dan waktu.

Peran Pemerintah dijelaskan oleh Gede Diva (2019: 15-18) diwujudkan sebagai regulator, katalisator dan fasilitator sebagai berikut:

#### 1. Regulator

Pemerintah sebagai regulator adalah mempersiapkan keseimbangan arah penyelenggaraan pemerintahan melalui penerbitan peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai sarana untuk mengatur setiap kegiatan yang dilakukannya dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat

#### 2. Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang memfasilitasi. Pemerintah sebagai fasilitator berkomitmen untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan. Peran pemerintah sangat berpengaruh dalam mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan

tentram, yang merupakan tugas pemerintah, baik pusat maupun daerah.

#### 3. Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator adalah mempercepat pengentasan pengangguran agar dapat mendapatkan pekerjaan. Pemerintah berperan dengan berfokus pada masyarakat dan memberikan bimbingan dan arahan yang efektif. Biasanya pemberian pembinaan diwujudkan melalui tim penyuluh atau lembaga tertentu untuk memberikan pendidikan.

Penelitian terdahulu dengan judul Analisis peran Dinas Tenaga Kerja dalam upaya mengurangi masalah pengangguran terdidik di wilayah Kota Pekanbaru yang ditulis oleh Z Zulkifli Alwi. Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sangat berperan dalam menjembatani dan memudahkan para pencari kerja, namun dikarenakan berbagai faktor eksternal seperti pandemi membuat lonjakan pengangguran besar-besaran membuat Disnaker kota Pekanbaru kualahan dalam mengendalikan angka pengangguran terdidik di Pekanbaru. Perbedaan penelitian yang dilakukan Z Zulkifli Alwi yakni menggunakan prespektif islam sedangkan penelitian ini tidak menggunakan prespektif islam. Peran Dinas Tenaga Kerja dalam menanggulangi angka pengangguran di Kabupaten Minahasa yang ditulis oleh Bayu Prasetyo, Michael Mantiri,

dan Frans Singkoh. Peran Dinas Tenaga Kerja sebagai suatu kebijakan, strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian, dan sebagai alat terapi. Perbedaan penelitian ini yaitu Dinas Tenaga Kerja sebagai penyedia informasi dan penyedia pelatihan bagi para pencari kerja terutama bagi lulusan menengah ke atas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer (observasi, wawancara), dan sekunder (jurnal, buku, artikel). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, studi lapangan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk penentuan informan yaitu purposive sampling. Teknik analisis data yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai upaya dalam mengurangi pengangguran terdidik yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Pembahasan ini mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi

pengangguran terdidik. Pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat tersebut berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh selama ini. Kota Surakarta merupakan suatu wilayah dengan sektor industri dan pariwisata juga dikenal sebagai kota pelajar, tetapi masih banyak pengangguran terdidik yang belum mendapatkan pekerjaan hal ini menjadi perhatian pemerintah agar masalah tersebut segera teratasi. Peran yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dalam upaya mengurangi masalah pengangguran terdidik yaitu peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Peran-peran tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

### **1. Peran sebagai Regulator**

Peran sebagai regulator adalah pelaksana kebijakan atau implementer yang dilaksanakan melalui program-program untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, sehingga dapat mempermudah para pengangguran terdidik / pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan. Dalam melaksanakan program/kegiatan maka Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Tenaga Kerja memiliki fungsi

melaksanakan urusan pemerintah bidang tenaga kerja.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang penempatan tenaga kerja dalam negeri yaitu perantaraan atau pelayanan antar kerja ada 3 perantaraan kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan informasi pasar kerja.

## **2. Peran sebagai Fasilitator**

Dinas Tenaga Kerja dalam upaya mengurangi masalah pengangguran terdidik memiliki peran sebagai fasilitator yaitu dengan menyediakan berbagai fasilitas bagi pencari kerja agar dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan, dengan melihat indikator yang pertama yaitu pelaksanaan dan program pelatihan dan informasi. Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta menyediakan fasilitas pelatihan-pelatihan yang dapat diikuti untuk menambah kompetensi.

Fasilitas yang diberikan untuk para pencari kerja selanjutnya yaitu penyelenggaraan promosi melalui media sosial seperti instagram, tiktok, story wa, dan facebook agar para pencari kerja bisa mengetahui loker yang baru dibuka oleh perusahaan, kemudian memfasilitasi permudahan usaha dengan mempertemukan calon pengusaha muda dengan perbankan dengan rekomendasi Dinas Tenaga Kerja.

Indikator yang kedua yaitu pelaksanaan program kegiatan sosialisasi. Program sosialisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk dilakukan pembinaan diutamakan melalui BKK, serta mengundang secara khusus ke Disnaker untuk sosialisasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Fasilitas Dinas Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan dengan menghadirkan orang yang ahli di bidangnya.

## **3. Peran sebagai Katalisator**

Peran pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja sebagai katalisator adalah mendorong perubahan dan perkembangan dengan melakukan pembinaan kepada pencari kerja dan melakukan kerjasama dengan perusahaan. Faktor penyebab pengangguran terdidik adalah kurangnya usaha untuk bekerja mereka memilih untuk bekerja dengan mudah tanpa tekanan tetapi mendapatkan uang dan lowongan/persyaratan rekrutmen dari perusahaan masih sulit. Program bantuan tidak ada, Dinas Tenaga Kerja hanya memfasilitasi melalui Program JKP untuk dibantu mencari pekerjaan terutama mereka yang terkena PHK. Dinas Tenaga Kerja tidak dapat menghitung berapa banyak pencari kerja yang telah terserap ke dunia kerja

hanya dilihat dari money yang dilakukan serta bekerjasama dengan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan soft skill.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan peran Dinas Tenaga Kerja dalam upaya mengurangi masalah pengangguran terdidik di wilayah Kota Surakarta menurut Diva (2019: 15-18) dengan menggunakan indikator peran Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta sebagai Regulator, Fasilitator, Katalisator sebagai berikut:

1. Sebagai Regulator, Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta memiliki peran sebagai implementer atau pelaksana kebijakan yang dilakukan dengan pelaksanaan program yang dapat diikuti oleh tenaga kerja terdidik untuk mempermudah dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan serta untuk menambah keterampilan para tenaga terdidik. Hal ini mencakup pelaksana, standar, dan prosedur yang berkaitan dengan rekrutmen, pelatihan, penempatan kerja, serta perlindungan tenaga kerja. Sebagai regulator, Dinas Tenaga Kerja juga bertanggung jawab untuk memastikan pihak terkait,

baik perusahaan maupun pencari kerja, mematuhi peraturan yang berlaku.

2. Sebagai Fasilitator, Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berperan sebagai pemberi akses dalam mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Hal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti bursa kerja, pelatihan kerja, informasi lowongan kerja serta sosialisasi. Dinas Tenaga Kerja juga memfasilitasi proses sertifikasi kompetensi kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta memudahkan dalam usaha dengan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja tersebut.
3. Sebagai Katalisator, Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta berperan memberikan informasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja agar mempercepat tenaga terdidik yang baru lulus dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi, hal ini dilakukan dengan cara pembinaan kepada pencari kerja dan melakukan kerjasama dengan perusahaan agar pencari kerja mendapatkan pekerjaan sesuai minat bakatnya. Dinas

Tenaga Kerja berupaya mengurangi pengangguran terdidik khususnya di Kota Surakarta dengan menyediakan berbagai pembinaan kepada pencari kerja khususnya di sekolah-sekolah kemudian juga menyelenggarakan pelatihan kerja, bursa kerja, serta job expo yang dapat diikuti oleh semua pencari kerja, kemudian Dinas Tenaga Kerja juga memberikan penghargaan kepada pencari kerja yang mengikuti penyelenggaraan kegiatan supaya menjadi penyemangat dan motivasi agar tetap optimis untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

Dari kesimpulan diatas maka dapat diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja memiliki peran dalam mengurangi pengangguran terdidik melalui berbagai program dan kegiatan, seperti pelatihan kerja, bursa kerja, dan informasi lowongan kerja. Dinas Tenaga Kerja menghadapi tantangan dalam upaya mengurangi pengangguran terdidik, seperti kurangnya informasi lowongan kerja yang tersedia, kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi, dan persaingan yang ketat di pasar kerja. Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi tantangan

tersebut, seperti menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, mengadakan pelatihan keterampilan, dan memberikan informasi lowongan kerja secara online. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja telah memberikan hasil yang positif, meskipun belum sepenuhnya optimal. Tingkat pengangguran terdidik di Kota Surakarta mengalami penurunan, namun masih perlu upaya lebih lanjut untuk mengurangi angka pengangguran secara signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Diva, G. (2019). *Mengembangkan UKM melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*. Jakarta: Bakric School of Management.
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori Makro Ekonomi* (5 ed.). Jakarta: Erlangga.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, D. (2013). *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sarwono, S. W. (2013). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



- Suharto, E. (2007). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Tobing, P. L. (2007). *Konsep Knowledge Management, Konsep, Arsitektur dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terdidik di Provinsi Jambi. *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 5(1), 26–32. <https://doi.org/10.22437/jels.v5i1.3926>
- Irawan, I. (2023). *Pengaruh Upah Minimum, Penanaman Modal dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2021*. Skripsi. Universitas Siliwangi.
- Kasnelly, F. A. J. S. (2020). *Meningkatnya Angka Pengangguran Ditengah Pandemi (Covid-19)*. Al-Mizan: *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 45–60.

## Jurnal

- Alpiah, N., & Subadi, W. (2021). Peran Pendamping Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong). *JAPB*, 4(1), 402–415.
- Alwi, Z. (2022). *Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Upaya Mengurangi Masalah Pengangguran Terdidik di Wilayah Kota Pekanbaru*. Skripsi. Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim.
- Astuti, W. Y. (2014). *Pengangguran Terdidik di Perkotaan*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fitri, F., & Junaidi, J. (2017). *Pengaruh Pendidikan, Upah dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran*

## Undang-Undang

- Undang-undang Nomor 13. (2003). *Tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Undang-undang Nomor 23. (2014). *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

## Web

- Pemerintah Kota Surakarta. (2024). Profil. Diambil 10 Februari 2025, dari <https://surakarta.go.id/>
- Putro, J. (2024). *Meski Sudah Berkurang, Pengangguran Kota Surakarta Masih Tinggi*. Diambil 10 Februari 2025, dari <https://www.rri.co.id/daerah/795686/meski-sudah-berkurang-pengangguran-kota-surakarta-masih-tinggi>